



Komprehensif Penafsiran dan Implementasi Guide to Indonesian Constitutional System Based on UUD 1945 Bagi Generasi Z

Comprehensive Interpretation and Implementation of Guide to Indonesian Constitutional System Based on UUD 1945 for Generation Z

Seri Mughni Sulubara^{1*}, Riska², Yeni Irma Normawati³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Indonesia

*E-mail: mughniseri@gmail.com¹, riska95144@gmail.com², yeninormawati01@gmail.com³

*Korespondensi penulis: mughniseri@gmail.com

Article History:

Received: September 07, 2024;

Revised: September 28, 2024;

Accepted: Oktober 23, 2024;

Published: Oktober 26, 2024

Keywords: Interpretation; Implementation; 1945 Constitution; Generation Z.

Abstract: The 1945 Constitution as the national constitution is the highest source of law that serves as a benchmark and guideline for other legal regulations. The 1945 Constitution as a written constitution has the highest authority in the Indonesian government system. Amendments to the 1945 Constitution occurred 4 (four) times, where the first change occurred in 1999, 2000, then 2001 and finally 2002. This research uses normative juridical research and library research (literature) which focuses on libraries to obtain data without conducting research in the field. Generation Z tends to be more interested in practical and visual things, so understanding the 1945 Constitution requires a flexible and adaptive strategy by using interactive and multimedia e-learning platforms such as animated videos, infographics, and educational applications to explain the articles of the 1945 Constitution. Integrating the 1945 Constitution in everyday life for generation Z can be done through various approaches that are relevant to their characteristics and needs in several effective ways. So that generation Z is able to understand and integrate the 1945 Constitution into their daily lives, making it a guideline in interacting and contributing to society.

Abstrak

UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis yang berwenang tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dimana perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1999, tahun 2000, kemudian tahun 2001 dan terakhir tahun 2002. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research* (kepustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Generasi Z cenderung lebih tertarik pada hal-hal praktis dan visual, sehingga memahami UUD 1945 membutuhkan strategi yang fleksibel dan adaptif dengan menggunakan platform e-learning yang interaktif dan multimedia seperti video animasi, infografis, dan aplikasi edukatif untuk menjelaskan pasal-pasal UUD 1945. Mengintegrasikan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari terhadap generasi Z dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka dengan beberapa cara yang efektif. Sehingga generasi Z mampu memahami dan mengintegrasikan UUD 1945 ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, menjadikannya sebagai pedoman dalam berinteraksi dan berkontribusi di masyarakat.

Kata Kunci: Penafsiran; Implementasi; UUD 1945; Generasi Z.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu prinsip negara hukum yang dijamin oleh konstitusi adalah mengenai proses hukum yang adil (*due process of law*). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (Seri Mughni Sulubara et al., 2024)

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 memberikan warna baru dalam sistem ketatanegaraan, terutama dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara. Pembentukan Mahkamah Konstitusi diperlukan karena Indonesia telah melakukan perubahan mendasar atas Undang-Undang Dasar 1945 (Rangga Wijaya, 2023). UUD 1945 merupakan konstitusi atau hukum tertinggi di negara Indonesia, UUD telah mengalami perubahan atau amandemen sebanyak 4 kali yaitu perubahan pertama pada tahun 1999, perubahan kedua pada tahun 2000, perubahan ke 3 pada tahun 2001, dan perubahan ke 4 pada tahun 2002, bersamaan dengan perubahan UUD 1945. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih kurangnya pemahaman-pemahaman mengenai UUD 1945, masih belum diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia secara luas. Masyarakat Indonesia harus mengetahui UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis yang memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia (Seri Mughni Sulubara et al., 2024). Pengujian undang-undang terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan wujud prinsip atau asas konstiusionalitas undang-undang (*constitutionality of law*) yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Liam, 2014).

Generasi Z di Indonesia menghadapi tantangan unik dalam memahami dan menghayati sistem konstitusional dan ketatanegaraan, terutama terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Generasi Z cenderung lebih tertarik pada hal-hal praktis dan visual, sehingga memahami dokumen-dokumen historis seperti UUD 1945 secara langsung dapat menjadi sulit. Menjelaskan UUD 1945 kepada Generasi Z membutuhkan strategi yang fleksibel dan adaptif dengan gaya belajar mereka. Gunakan platform e-learning yang interaktif dan multimedia seperti video animasi, infografis, dan aplikasi edukatif untuk menjelaskan pasal-pasal UUD 1945.

Bangsa yang baik adalah bangsa yang mampu mempertahankan budayanya sehingga mampu dibedakan dengan bangsa lain. Mempertahankan budaya bangsa di tengah gempuran budaya asing merupakan hal yang tidak mudah (Kemendiknas, 2014). Konstitusi di Indonesia bermula dari kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang dan berubah, meskipun UUD 1945 telah mengalami beberapa amendemen, namun beberapa pihak berargumen bahwa konstitusi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Indonesia (Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, 2023).

Pendidikan kewarganegaraan dapat memperkuat rasa nasionalisme dan cinta tanah air sehingga akan membentuk karakter Generasi Z yang patuh pada hukum dan berkontribusi positif pada pembangunan negara. Selain itu, pembahasan tentang kajian filosofis pada Pembukaan UUD 1945 juga akan sangat menarik untuk diikuti. Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, di mana budaya luar dapat dengan mudah masuk ke dalam negeri, maka penulisan dengan topik yang sangat penting ini akan memiliki kontribusi positif dalam membentuk karakter siswa yang lebih baik dan menjadi warga negara yang dapat bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional (Santoso et al., 2023). Perlu diakui bahwa perubahan UUD 1945 hasil amendemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia (Wiratraman, 2007). Penulis mencoba mengkaji sejauh mana pemahaman Generasi Z dalam memahami pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, penulis mencoba memberikan keilmuan serta pengetahuan terhadap mereka melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, menjadi alasan penulis untuk melakukan kegiatan pengabdian terhadap masyarakat dan mengangkat judul penelitian dengan tema “Pemahaman Constitutional System Of Indonesia (UUD 1945) dan Sistem Ketatanegaraan Lembaga Negara Bagi Generasi Z”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan *library research* (kepuustakaan) yang memusatkan kegiatan pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset di lapangan. Maka sumber data diperoleh dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan- putusan, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif. Dengan demikian, data yang diperoleh akan lebih akurat.

3. HASIL

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengadopsi prinsip demokrasi dalam hal penyelenggaraan negara, Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah Demokrasi Pancasila. Nilai atau spirit Demokrasi Pancasila bersumber dan mengakar dalam kehidupan masyarakat nusantara jauh sebelum Indonesia Merdeka (Hasanah, 2022). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum, karena itu pengakuan hukum dan keadilan merupakan syarat mutlak dalam mencapai tegaknya negara hukum yang dijamin oleh konstitusi (Latif, 2016), di mana secara yuridis kewenangan adalah hak dan kekuasaan pemerintah yang sah secara hukum, maka dalam konsep negara hukum (*rechstaat*) segala tindakan pemerintah yang bersumber dari kewenangannya haruslah bersandarkan pada asas legalitas (Said, 2015). Dalam UUD 1945 (sebelum amandemen), murni berkarakteristik Demokrasi Pancasila yang bercirikan musyawarah mufakat (Hasanah, 2022).

Negara Indonesia adalah negara hukum (Negara & Indonesia, 2017). Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 telah menyebabkan banyak perubahan di negeri ini, termasuk terhadap sistem dan praktik ketatanegaraan kita. Setiap gagasan akan perubahan tersebut sudah dituangkan dalam amandemen I s/d IV UUD 1945 (Aritonang, 2010). UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya (Jerimas Pelokilla, 2023). Penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi bangsa memang memungkinkan untuk melakukan amandemen terhadap UUD (Pambudi, 2018). Aturan hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban serta keamanan. Oleh karena itu Rule Of Law (penegakan aturan hukum) harus dapat diwujudkan. Aturan hukum dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat agar taat akan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bila Rule Of Law (penegakkan aturan hukum) tidak berjalan dengan baik dapat berakibat terjadinya chaos di tengah masyarakat. Sebaliknya jika penegakkan hukum berjalan dengan baik akibatnya keadilan dan kedamaian masyarakat dapat diwujudkan. Rule of law merupakan sirkulus yang bertujuan supaya hukum dapat ditegakkan dengan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Fungsi rule of law pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap “rasa keadilan” bagi rakyat Indonesia dan juga “keadilan sosial” sehingga diatur pada pembukaan UUD 1945 (November et al., 2023).

Untuk memahami bagaimana Pemahaman Constitutional System Of Indonesia (UUD 1945) dan Sistem Ketatanegaraan lembaga-lembaga negara bagi generasi Z, perlu dipahami beberapa aspek penting dari UUD 1945 dan struktur pemerintahan Indonesia yang telah

diamandemen.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi Tertulis: UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang berwenang tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ia menjabarkan prinsip-prinsip dasar dan cita-cita negara, termasuk Pancasila, yang merupakan ideologi negara Indonesia. Struktur Pemerintahan: Struktur pemerintahan Indonesia berbasis presidensial, dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, amandemen-amandemen telah dilakukan untuk memperkuat sistem checks and balances dan memastikan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang.
- 2) Amandemen-Undang-undang Dasar 1945. Perubahan Signifikan: UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Amandemen ini bertujuan untuk memperbaiki struktur pemerintahan, memperkuat demokratisasi, dan memastikan hak asasi manusia. Implikasi Bagi Generasi Z: Generasi Z perlu memahami bahwa UUD 1945 bukan hanya dokumen historis tapi juga sumber hukum yang aktif digunakan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Mereka harus sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta bagaimana amandemen-amandemen telah meningkatkan proteksi hak-hak individu dan demokratisasi dalam sistem politik Indonesia.
- 3) Struktur Ketatanegaraan Pasca-Amandemen. Lembaga-Lembaga Negara Baru: Setelah amandemen, lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Daerah, dan Bank Sentral telah dibentuk untuk memastikan implementasi hukum yang lebih transparan dan akuntabel. Fungsi-Fungsi Lembaga: Generasi Z harus memahami fungsi-fungsi lembaga-lembaga negara ini, seperti alat-alat kelengkapan negara yang membantu menjalankan sistem pemerintahan dengan efektif. Misalnya, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengadil atas interpretasi undang-undang dasar, sedangkan Komisi Yudisial bertugas memantau independensi dan integritas anggota badan peradilan.
- 4) Implementasi Hukum dan Demokratisasi. Rule Of Law: Implementasi Rule Of Law menjadi penting bagi generasi Z. Aturan hukum harus dijalankan secara adil dan transparan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan sosial. Hal ini juga relevan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan keadilan social dan kerakyatan. Partisipasi Politik: Partisipasi aktif dalam proses demokratisasi juga penting. Generasi Z bisa berpartisipasi dalam diskusi publik, ikut ambil bagian dalam pilpres/pilkada, dan memilih calon-calon

politisi yang mereka percayai untuk memajukan visi demokratisasi dan keadilan sosial.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, generasi Z dapat memiliki pemahaman yang lebih luas tentang Sistem Constitutional dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, serta bagaimana dokumen-dokumen historis seperti UUD 1945 tetap relevan dalam era modern. Mereka harus sadar akan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam menjaga dan membangun demokrasi yang lebih baik.

4. DISKUSI

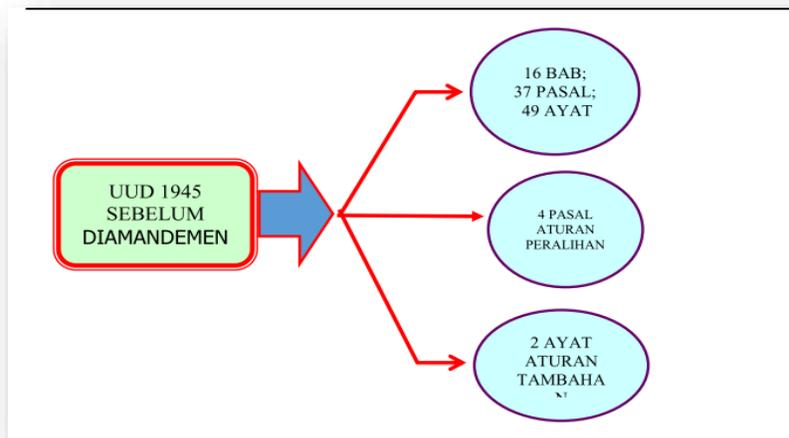
Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dimana perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1999, tahun 2000, kemudian tahun 2001 dan terakhir tahun 2002. Dengan adanya perubahan tersebut maka berubah pula tatanan struktur tatanegara Negara Indonesia. Perubahan terjadi untuk memperbaiki sitem tatanegara Indonesia yang dinilai memiliki kecacatan terhadap keberlangsungan hidup baik dari sisi pemerintahan maupun terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, yang tentunya mengarah untuk perbaikan Negara Indonesia itu sendiri (Agustiwi, 2014). Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang berlaku di Indonesia yang meliputi atau mencakup Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dikaji kedua komponen tersebut dengan pendekatan filosofis (ontologis), historis-sosiologis, sistematis dan yuridis-fungsional, menunjukkan adanya komitmen kemanusiaan yang tinggi dari bangsa Indonesia meskipun belum diidealisasi dan disistematisasi secara lengkap dalam daftar hak-hak asasi manusia seperti halnya piagam HAM sedunia beserta konvenannya. Hal ini bisa dimengerti karena Undang-Undang Dasar 1945 kehadirannya lebih dahulu daripada deklarasi hak asasi manusia (Haryanto et al., 2013).

Adapun sifat-sifat dari UUD 1945 adalah:

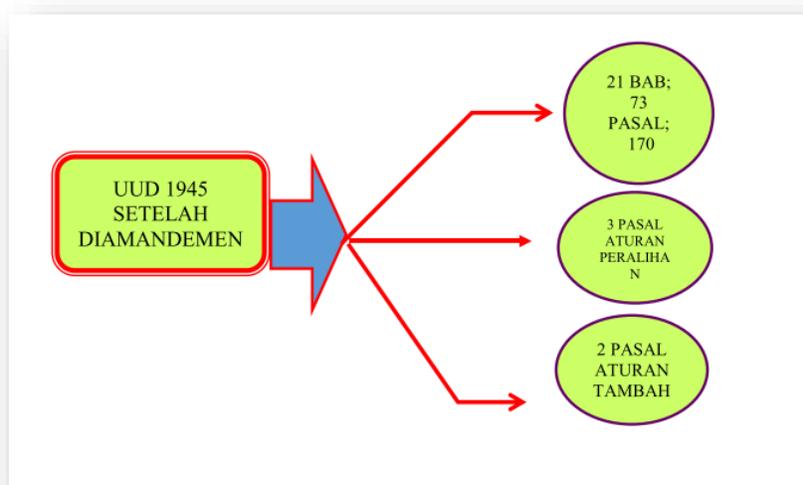
- 1) Sebagai sumber hukum dasar merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karenanya Undang-Undang, peraturan-peraturan, keputusan-keputusan pemerintah, termasuk kebijaksanaan pemerintah harus berdasarkan UUD 1945.
- 2) Sebagai norma hukum yang berkedudukan yang tertinggi.
- 3) Sesuai penjelasan UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis. Dikenal juga hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi sebagai aturan pelengkap untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik kenegaraan.

4) UUD 1945 bersifat singkat yang terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan. Tetapi UUD 1945 ini juga bersifat supel sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan dengan alasan sebagai berikut:

- a. UUD 1945 memuat aturan-aturan pokok saja, yaitu garis-garis besarnya saja, sedangkan aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok diatur oleh Undang-Undang yang lebih rendah yang mudah diubah dan dicabut.
- b. Masyarakat dan negara Indonesia akan berkembang terus secara dinamis, sesuai dengan kemajuan zaman/modernisasi.
- c. Sifat dari aturan tertulis yang mengikat, supel/elastis, semakin baik, karena UUD 1945 tidak ketinggalan zaman.



Gambar 1. UUD 1945 Sebelum Amandemen



Gambar 2. UUD 1945 Sesudah Amandemen

Menurut pendapat Jimly Asshiddiqie,⁸ Isi atau substansi pembukaan UUD 1945, terdiri atas bagian pertama, alinea pertama, kedua, dan ketiga, menggambarkan keadaan Indonesia sebelum merdeka sampai saat kemerdekaan. Bagian kedua yaitu alinea keempat menggambarkan keadaan Indonesia sesudah kemerdekaan yang berisi:

- a. terbentuknya negara kesatuan republik Indonesia (NKRI);
- b. tujuan negara;
- c. ketentuan adanya Undang-Undang Dasar;
- d. ketentuan bentuk negara yaitu berbentuk “republik” yang berkedaulatan rakyat;
- e. ketentuan adanya dasar negara/ ideology negara yaitu Pancasila.

Sistematika UUD 1945 sebelum perubahan terdiri dari pembukaan, batang tubuh, aturan peralihan dan tambahan serta penjelasan. Sedangkan sistematika UUD 1945 setelah perubahan terdiri dari pembukaan, pasal-pasal, aturan peralihan dan aturan tambahan. Namun dalam ketentuan aturan tambahan UUD 1945 menyatakan, dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal.

Mengintegrasikan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari Generasi Z dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka. Berikut adalah beberapa cara yang efektif:

- 1) Penggunaan Teknologi dan Media Sosial. Manfaatkan platform digital untuk menyebarkan informasi mengenai UUD 1945. Kampanye kreatif di media sosial dapat menarik perhatian Gen Z, misalnya dengan membuat konten edukatif dalam bentuk video, infografis, atau podcast yang menjelaskan pasal-pasal penting dan relevansinya dalam kehidupan sehari-hari
- 2) Metode Pembelajaran Interaktif. Gunakan metode pembelajaran yang interaktif seperti simulasi sidang parlementer atau debat. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang UUD 1945, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif dan diskusi di antara mereka.
- 3) Kegiatan Ekstrakurikuler. Libatkan Gen Z dalam kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada nilai-nilai kebangsaan, seperti pramuka atau paskibra. Kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan pemahaman tentang pentingnya UUD 1945 sebagai dasar negara.

- 4) Diskusi dan Seminar. Adakan seminar atau diskusi yang melibatkan tokoh inspiratif dari kalangan Gen Z untuk membahas relevansi UUD 1945 dalam konteks modern. Ini dapat membantu mereka melihat penerapan nilai-nilai konstitusi dalam isu-isu sosial yang mereka hadapi.
- 5) Proyek Kolaboratif. Ajak Gen Z untuk berpartisipasi dalam proyek sosial yang mengedepankan nilai-nilai UUD 1945, seperti gotong royong dalam komunitas atau kegiatan lingkungan. Ini akan membuat mereka lebih memahami dan menghayati prinsip-prinsip konstitusi dalam tindakan nyata.
- 6) Edukasi Keluarga dan Masyarakat. Libatkan keluarga dan masyarakat dalam proses edukasi tentang UUD 1945. Keluarga dapat menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai konstitusi di rumah, sementara masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai tersebut.

Dengan pendekatan-pendekatan ini, Generasi Z tidak hanya akan memahami UUD 1945, tetapi juga mampu mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, menjadikannya sebagai pedoman dalam berinteraksi dan berkontribusi di masyarakat.



Gambar 3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 4. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

5. KESIMPULAN

UUD 1945 sebagai konstitusi nasional merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi patokan dan pedoman bagi peraturan hukum lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis yang berwenang tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Ia menjabarkan prinsip-prinsip dasar dan cita-cita negara, termasuk Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia. Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dimana perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1999, tahun 2000, kemudian tahun 2001 dan terakhir tahun 2002. Dengan adanya perubahan tersebut maka berubah pula tatanan struktur tatanegara Negara Indonesia. Mengintegrasikan UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari Generasi Z dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan mereka dengan beberapa cara yang efektif. Sehingga generasi Z mampu memahami dan mengintegrasikan UUD 1945 ke dalam kehidupan sehari-hari mereka, menjadikannya sebagai pedoman dalam berinteraksi dan berkontribusi di masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Agustiwi, A. (2014). Keberadaan Lembaga Negara Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Di Indonesia. *Journal Rechstaat*, 8(1), 7–8.
- Aritonang, D. M. (2010). Sistem Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. *Mimbar Hukum*, 22(2), 391–407.
- Gunawan Santoso, Aim Abdul Karim, Bunyamin Maftuh, Sapriya, M. M. (2023). Kajian Konstitusi di Indonesia: Kembali pada UUD 1945 Asli atau Tetap dalam UUD NRI 1945 di Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 257–269. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/140>
- Haryanto, T., Suhardjana, J., A. Komari, A. K., Fauzan, M., & Wardaya, M. K. (2013). Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(2), 136–144. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.2.54>
- Hasanah, S. (2022). Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen. *MEDIA KEADILAN Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 361–372.
- Inspirasi, J., Untuk, M., & Vol, N. (2024). Available Online at: <https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/sejahtera>. 3(3).
- Jerimas Pelokilla. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24–28. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i1.11>
- Kemendiknas. (2014). Nilai-Nilai dalam Pendidikan Karakter Bangsa yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. *E-Journal Widya Non-Eksakta*, 1(1), 7–14.
- Latif, A. (2016). Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil. *Jurnal Konstitusi*, 7(1), 049. <https://doi.org/10.31078/jk714>
- Liam, T. (2014). Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 89–106. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1159>
- Negara, U. D., & Indonesia, R. (2017). *76259UUD45-Amandemen-4-2002*. 1–21.
- November, N., Sulubara, S. M., & Prayetno, B. E. (2023). *Cakrawala : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global Mengetahui Aturan Hukum dengan Menghafal Naskah Pembukaan UUD 1945 dan Pasal- Pasal UUD 1945 Secara Tekstual dan Mengetahui Makna yang Tekandung di Dalamnya Bagi Siswa-Siswi IPA-IPS SMA Negeri 7 Takengon Kno*. 2(4).
- Pambudi, W. (2018). 19401-48204-1-Pb. *Sakralisasi Pembukaan Uud 1945*, 4(1), 1–12.
- Rangga Wijaya. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*,

1(1), 23–27. <https://doi.org/10.60153/ijolaes.v1i1.5>

Said, A. R. A. (2015). Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No. 4, Oktober-Desember 2015. Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 505–530. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>

Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi melalui Kajian Filosofis Pembukaan UUD 1945 Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JUPETRA)*, 2(1), 297–311. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/137>

Wiratraman, R. H. P. (2007). Hak-Hak Konstitusional warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan dan Dinamika Implementasi. *Hukum Panta Rei*, 1(1), 1–18.